

ANALISIS TEKNIK PENGENDALIAN KOLABORASI BALAI BESAR POM DAN DINAS KESEHATAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG

Dhwi Ba'diya Maulina Ikhsani, Sutopo Patria Jati, Nikie Astorina Yunita D.

Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro

Email: maulinasani@gmail.com

Abstract: *In 2017, (BB POM) Food and Drug Administration Office of Central Java reported Semarang City as the one of 5 cities experiencing poisoning from 253 cases at Central Java. A preliminary survey found that some household food industry products (IRTP) that have obtained certificates for home industry food management (SP-PIRT) potentially cause poisoning because they are not in accordance with the food types permitted by law. Instead, the purpose of this study traces the problem causes using interorganizational collaboration theory, through an interaction approach between BBPOM and Health Department Office of Semarang City regarding this issuance of SP-PIRT. The method used is qualitative with in-depth interview technique to 8 informants, observation and document review assistance. The result of the study shows, there are two types of constraints faced by collaborators: The first obstacle in the initial elements, namely: the lack of communication design and human resource. Meanwhile the constraints of emergent elements are in the form of not yet determined work plans and shared targets, weak mutual trust both institutions then inconsistent and obscure communication as well as collective identity. Furthermore, the constraint control strategies used by collaborators are retreating, reconfiguring restructuring and resolving. The conclusion of this analysis describes 2 constraints that do not have the control strategy, 1 constraint was controlled inappropriately (underadjusting) and the rest has been controlled appropriately. Based on the results above, collaboration in food security could be increased by considering the compatibility between constraints and the adjustment strategy.*

Keywords : food security, collaboration, processed food, food household industry, food poisoning.

PENDAHULUAN

Pengamanan makanan dan minuman merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kesehatan yang tercantum dalam Pasal 48 UU No. 36 Tahun 2009.¹ Di tahun 2017 KLB keracunan pangan telah menyebabkan 12 orang meninggal, 870 mengalami rawat inap dan 1,236 menjalani rawat jalan.¹

Pengamanan pangan diwujudkan melalui penerbitan sertifikat pangan. Namun hasil kajian nasional menunjukkan bahwasanya hubungan POM dan Dinas Kesehatan (Dinkes)

perlu ditingkatnya. Hal ini karena 43% sarana produksi tidak diperiksa sesuai standar sebelum diberikan izin edar diterbitkan, hanya 49% label produk memenuhi persyaratan, 34% penyelenggaraan sertifikasi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) tidak dilaporkan kepada BPOM. Kompleksitas permasalahan tersebut dapat berakibat pada kualitas jaminan keamanan pangan yang diterbitkan.² Sertifikat pangan industri rumah tangga atau yang dikenal dengan SP-IRT adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota

melalui Dinkes Kota atau Kabupaten sebagai manifestasi kolaborasi BPOM dengan aparaturnegara untuk kepastian keamanan pangan olahan yang berasal dari industri rumah tangga. Menurut Bambang Hermanu Saat Seminar Nasional Multidisiplin tanggal 18 Agustus 2015, manajemen kolaborasi pengamanan pangan di Semarang masih belum optimal. Dinkes mengaku tidak dapat melakukannya secara optimal karena selain jumlah tenaga Dinas yang terbatas. Untuk itu, peneliti juga melakukan survei pasar guna melihat peredaran produk di Kota Semarang, maka peneliti menemukan masih banyak PIRT berjenis produk olahan rantai dingin (*cool chain*) dan fitofarmaka yang mana produk tersebut dalam peraturan perundangan tidak boleh mendapatkan izin edar PIRT karena beresiko menyebabkan keracunan. Fenomena di atas membuat peneliti menganalisa kesuksesan kolaborasi antara Balai Besar POM Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam penerbitan sertifikat pangan industri rumah tangga di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap informan terkait elemen-elemen yang terlibat dalam proses kolaborasi pemberian sertifikat PIRT dan telaah laporan pelaksanaan keamanan pangan Dinas Kesehatan. Penelitian kualitatif menghasilkan laporan dari temuan yang ditulis secara naratif dan wawancara, dibantu catatan lapangan, telaah berbagai teks atau wawancara lainnya dan memerlukan keterampilan tertentu dalam penyampaiannya.³ Penelitian kualitatif di bidang

kehatan dengan metode deskriptif sering digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan konsep evaluasi, penelitian ini meninjau pencapaian tujuan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya.⁴ Ditinjau dari proses kolaborasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pengamanan pangan melalui penguatan kelembagaan dalam pemberian sertifikat PIRT terhadap pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan SP-PIRT pada hakekatnya ditentukan dari indikator kuantitas dan kualitas. Hasil pelaksanaan pengamanan pangan di kota Semarang sejak tahun 2010 hingga sekarang tercatat 579 PIRT telah memiliki izin edar, di tahun 2017 PIRT yang diterbitkan dan diperpanjang masing-masing berjumlah 205 dan 102. Kualitas jaminan keamanan pangan tidak terlepas dari proses seleksi yang terstandar. Seleksi dilandaskan atas kesesuaian jenis pangan, sanitasi, higienitas, keamanan bahan baku dan bahan tambahan pangan. Sekarang inovasi-inovasi produk yang berkembang sangat cepat, sering kali menyebabkan jenis/ variasi baru yang belum tercantum di peraturan sebagai daftar PIRT yang diperbolehkan. Akibatnya banyak SP-PIRT yang dikeluarkan terhadap produk yang tidak sesuai jenis bahkan ada produk yang sesuai jenis yang terdaftar dalam peraturan tetapi tidak mendapatkan SP-PIRT.

Setelah melakukan observasi dan wawancara mendalam untuk memastikan ada atau tidaknya kesenjangan jenis pangan dengan izinya maka, semua responden mengatakan bahwa kesenjangan izin produk di Kota Semarang masih

banyak terjadi. Adapun dalam rakerkesnas 2017, BPOM bersama Kementerian Kesehatan telah membahas kesenjangan pangan sesuai jenis yang dikeluarkan izin edarnya, namun sampai saat ini Balai Besar POM di Semarang tidak melakukan evaluasi terhadap data SP-PIRT yang dilaporkan. Sedangkan jika terdapat ketidaksesuaian produk ketika inspeksi paska market, Dinas Kesehatan Kota tidak merekap data pembatalan SP-PIRT sehingga tidak diketahui jumlah kesenjangan tersebut di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hermanu tahun 2016 yaitu lemahnya implementasi sistem dan kurangnya integrasi sinergi pengamanan pangan menyebabkan pelaksanaan penerbitan SP-PIRT belum berjalan efektif.

Dengan adanya kesenjangan jenis produk dan izin edar yang tidak sesuai, akan berimplikasi pada penurunan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta kualitas jaminan keamanan produk. Penyebabnya ialah semua tingkat risiko keamanan pangan dipengaruhi oleh jenis pangan, penggunaan bahan baku, proses produksi tertentu, klaim/farmakologi dan target konsumen itu sendiri.⁵ Karenanya penting sekali Dinas Kesehatan dan Balai Besar POM bersinergi untuk mengendalikan ketidaksesuaian jenis pangan dan izin edarnya.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi antara BB POM Jateng dan Dinkes Kota Semarang dalam penerbitan sertifikat pangan industri rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan terdapat hambatan pada sebagian besar elemen kesuksesan kolaborasi.

Beberapa elemen yang mendukung kesuksesan kolaborasi diantaranya tingginya komitmen anggota, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana, serta kekuatan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi ini terus berlangsung.

2. Hambatan kolaborasi antara BB POM Jateng dan Dinkes Kota Semarang ialah belum tersedia *design* komunikasi yang memadai, kekurangan sumberdaya manusia, proses komunikasi yang tidak berjalan rutin dan informasi yang tidak merata, kepercayaan yang kurang serta kerekatan dan kebermanfaatan organisasi yang belum dirasakan oleh semua pihak.
3. Teknik pengendalian hambatan elemen kesuksesan yang digunakan dalam kolaborasi ini adalah melakukan analisis beban kerja (ABK), kerjasama lintas sektor BB POM dengan BPSDP Jateng dan memanfaatkan petugas Jabatan Fungsional, mengadakan asreg sistem informasi terintergasi secara *online* untuk pelaporan SP-PIRT serta merancang peraturan daerah Kota Semarang.
4. Analisa teknik pengendalian berdasarkan jenis strategi *adjustment* yang digunakan dalam hambatan kolaborasi ini ialah *retreating*, *reconfiguring*, *restructuring* dan *resolving*.
5. Rekomendasi strategi *adjustment* yang tepat berdasarkan penelitian ini yaitu *retreating* untuk meningkatkan kepercayaan, *reconfiguring* untuk mengatasi kelancaran proses komunikasi dan *resolving*

untuk meningkatkan identitas bersama.

SARAN

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang
 - a) Diharapkan dapat melibatkan petugas Sanitasi dan Higinitas Puskesmas sebagai anggota satuan tugas pengawasan pengamanan pangan *post-market* untuk meningkatkan pengendalian kurangnya SDM.
 - b) Diharapkan melibatkan seluruh petugas di Seksi Kefarmasian dan Perbelakan Kesehatan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BB POM untuk mengatasi mutasi petugas yang telah terlatih.
 - c) Diharapkan Dinas Kesehatan dapat mengadakan desiminasi informasi melalui perwakilan yang terlibat dalam pertemuan dengan BB POM untuk mengatasi komunikasi informasi yang belum merata.
2. Bagi Balai Besar POM di Semarang
 - a) Diharapkan BB POM melakukan menetapkan jadwal pertemuan rutin dengan seluruh Dinas Kesehatan di Jawa Tengah termasuk Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk mengantisipasi jadwal pertemuan yang berbenturan sehingga proses komunikasi berjalan lancar sekaligus meningkatkan kepercayaan kolaborator.
 - b) Diharapkan Balai Besar POM menawarkan *feedback* kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang atas terlaksananya kolaborasi yang baik sehingga termotivasi meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Kesehatan No.36 Tentang Kesehatan. Jakarta; 2009
2. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2016
3. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2017
4. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2018
5. Laporan Tahunan 2017. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2018
6. Laporan Tahunan Balai Besar POM di Semarang 2017. Semarang: Balai Besar POM di Semarang; 2018
7. Laporan Tahunan BPOM 2016. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2017
8. Undang-Undang No. 18 Tentang Pangan. Jakarta; 2012
9. Sampurno, Dwi Ondri. Sinergitas Badan POM dan Dinas kesehatan Provinsi atau Kabupaten atau Kota dalam Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan. Dipresentasikan dalam RakerKesNas di Jakarta 28 Februari 2017
10. Bambang Hermanu. Dalam Mewujudkan Efektivitas Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga. Semarang :Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 17 Agustus 1945; 2014 (2),424–435
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Profil Kesehatan Kabupaten Semarang 2015. Ungaran; 2016
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Profil Kesehatan Kabupaten Semarang 2016. Ungaran; 2017

13. Mayangseri, E., Lestari, B., & Setyawan, S. at al. Buku Ajar Farmakologi Dasar. Malang: Tim UB Press; 2017
14. Chandra, B. Ilmu Kedokteran dan Pencegahan Komunitas. Jakarta : EGC; 2006
15. Arisman. Keracunan Makanan Buku Ajar Ilmu Gizi. Jakarta: EGC; 2009
16. Department of Health and Human Service <https://www.foodsafety.gov/poisoning/causes/index.html> diakses tanggal 27 September 2018
17. Minnesota *Department of Health* <http://www.health.state.mn.us/foodsafety/prevention.html> diakses tanggal 26 September 2018
18. Tobing, Bortiadty. Rantai Pasok Pangan (*food Supply Chain*). <https://www.supplaychain.com/new/rantai-pasok-bahan-pangan-food-supply-chain/> diakses tanggal 27 September 2018
19. Sihombing, J.H. *Indonesia Food Safety Regulation and Opportunity to Support the Food Innovation in Indonesia*. Dipresentasikan dalam Asian Australian Food Innovation Conference pada 18 Maret 2016
20. Undang-Undang No. 18 Tentang Pangan Tahun 2012
21. Peraturan Pemerintah No. 28 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Tahun 2004
22. Afrianto, E. Pengawasan Mutu Bahan atau Produk Pangan. Dipresentasikan Dalam Pelatihan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta; 2008
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
24. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang Keamanan dan Gizi Pangan
26. Peraturan Menteri Pertanian No. 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan. Jakarta : Kementerian Pertanian
27. <http://tekpan.unimus.ac.id/2015> diakses tanggal 14 Oktober 2018
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia No.KEP.02/MEN/2007
29. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 /Permen - Kp/2016tentang Cara Pembenihan Ikan Yang Baik. 2016
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 715/MENKES/SK/V/2003
31. Standar Nasional Indonesia (PP 102/2000). Jakarta: Badan Standarisasi Nasional
32. <http://clearinghouse.pom.go.id/content-standar-nasional-indonesia.html> diakses tanggal 14 Oktober 2018
33. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/Permen-Kp/2016 Tentang Persyaratan dan Tatacara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
34. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
35. Permenkes No. 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas

- Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten / Kota
36. Undang-Undang. No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 37. Instruksi Presiden No.3 Tentang Peningkatan Efektifitas Pegawai Obat dan Makanan. Jakarta ; 2017
 38. Pratikno. Managemen Organisasi dalam Perspektif Strukturisasi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada; 2007
 39. Stefani V, Sunardi O. Peran *Dependency, Commitment, Trust* dan *Communication* Terhadap Kolaborasi Rantai Pemasok Dan Kinerja Perusahaan : Studi Pendahuluan. Bandung. Institute Teknologi Bandung 2014; 13(3):322–33
 40. Patricia A. Geer. *Elemens of Effective Interorganizational Collaboration: A Mixed Methode Study. California : University of California*; 2017
 41. Halim, Abdul & Cahyono et al. Sistem Pengendalian Manajemen. UPP AMP YKPN; 2003
 42. Anthony dan Govindarajan. *Management Control Systems*. Irwin. Chicago; 2004
 43. Zimmermann, A. dan Sparrow, P. *Mutual Adjustment Processes In International Teams: Lessons For The Study Of Expatriation. Interna-Tional Studies In Management And Organization. Leicestershire ; 2007, 37 (3), Pp. 65-88*
 44. Santana SK. Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2007.
 45. Sumantri A. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Prenada Media Group; 2011.
 46. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang 2015. Semarang; 2016
 47. Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang 2016. Semarang; 2017
 48. Faturohman, O. Faktor Kunci Keberhasilan Komponen Penyusunan Menejemen Perencanaan Strategis Sekolah. Banten; 2017. Vol. 3. No. 01, hal.77-89
 49. Harsanto, B. T. Analisis Kinerja Lembaga Kerjasama Antardaerah dalam Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah Kajian Aspek Kelembagaan. Disertasi. Bogor : Institut Pertanian Bogor; 2012
 50. Dibble, R and Gibson, C. *Collaboration for The Common Good: An Examination of Challenges and Adjustment Processes in Multicultural Collaborations. University of San Fransisco. San Francisco; 2013. Organizational Behavior 34, 764–790*
 51. Manullang, A. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu dan Resiko Kesalahan Terhadap Penurunan Kualitas Audit. Semarang; 2010, Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 1, 81 – 94
 52. Yunus, E. Manajemen Strategis. Yogyakarta; Adhi. 2016, Ed.I
 53. Nurhab, M I. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Analisis Regrensi Berganda. *Global. 2018, Vol.2 No.2*
 54. Wulandari, R. Strategi Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Skripsi. Makasar; Universitas Negeri Alauddin. 2018

55. Sevitasari, D. Analisis Tingkat Keamanan Pangan Produk Olahan Hasil Pertanian Di Industri Pangan Skala Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Kota Batu. Thesis. Malang; Universitas Mauhammadiyah Malang. 2011
56. http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_EKONOMI_DAN_KOP/ERASI/196302211987032-NETI_BUDIWATI/MEMBANGUN_KERJA_SAMA_USAHA.pdf
Diakses tanggal 08 Maret 2019
57. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang 2015. Semarang: 2016
58. Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang 2016. Semarang. 2017

